



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998 perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban yang sistematis, jelas, terukur dan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Berdasarkan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 Penyusunan LKjIP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, laporan kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui Perjanjian Kinerja (PK) disertai dengan penjelasan yang memadai atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
3. Menjadikan Kabupaten Banjarnegara akuntabel, sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.



5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Banjarnegara terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

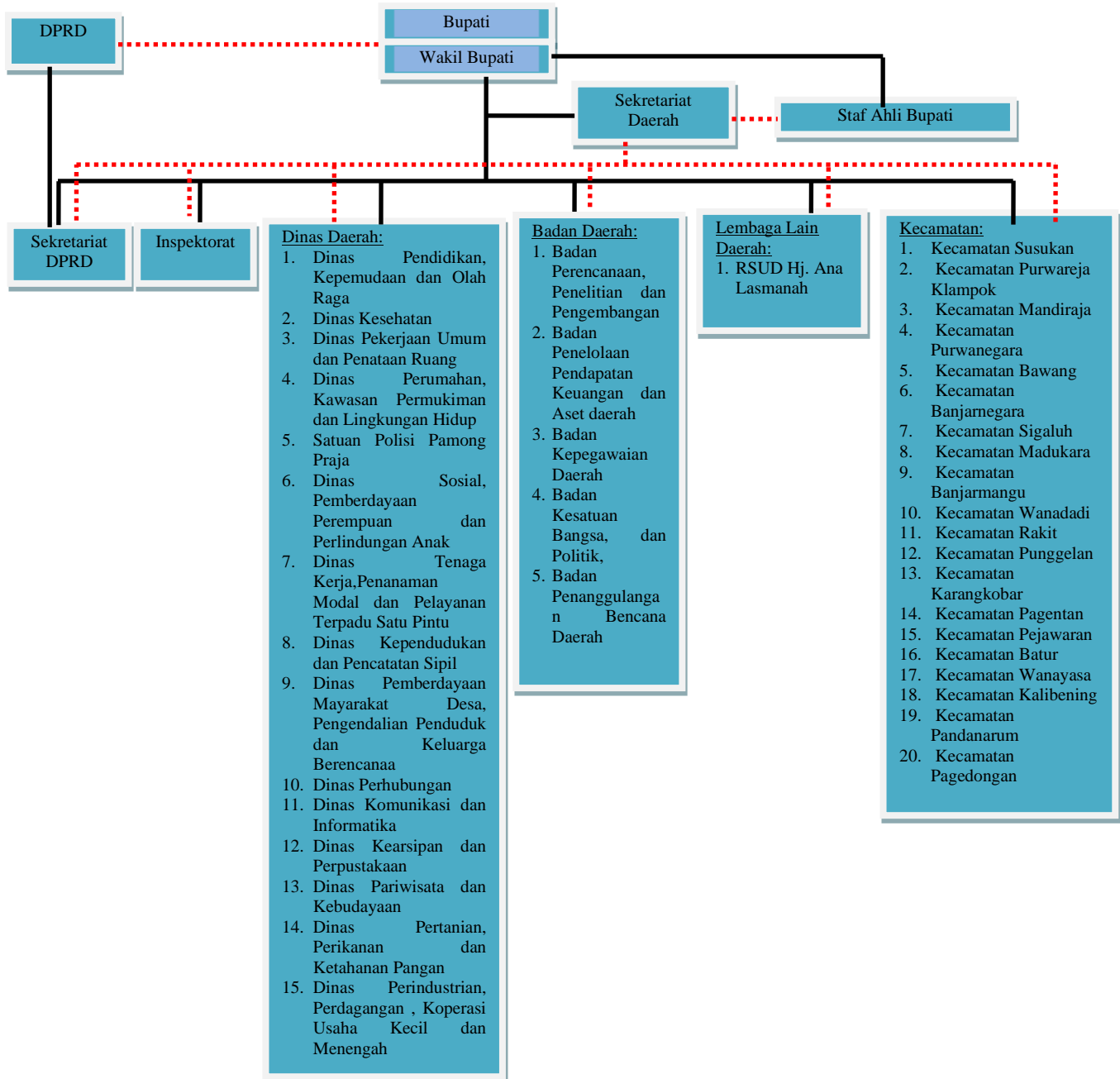
### **1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan restrukturisasi kelembagaan atau lebih dikenal dengan Penataan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **2. Susunan Organisasi**

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

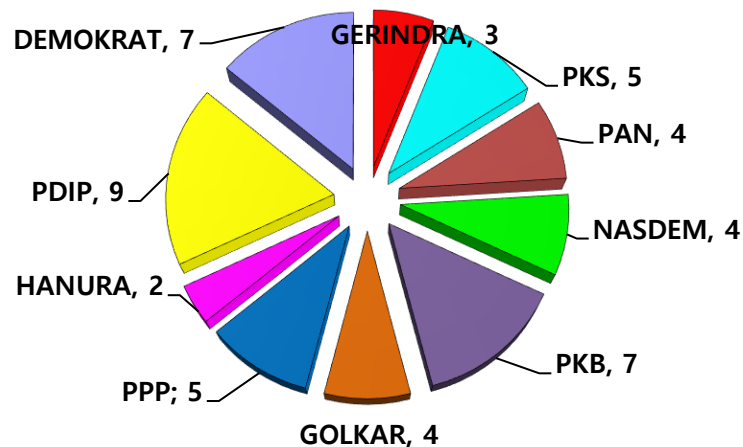


Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah 1) Sekretariat Daerah tipe B; 2) Sekretariat Daerah tipe B; 3) Inspektorat tipe A; 4) Dinas Daerah tipe A sejumlah 7 dinas, tipe B sejumlah 7 dinas dan tipe C sejumlah 1 dinas; 5) Badan Daerah tipe A sejumlah 3 badan, tipe B sejumlah 1 badan, Tipe C sejumlah 1 badan; Kecamatan tipe A sejumlah 20 kecamatan, daftar dan tipe perangkat daerah terlampir.

Berjalannya pemerintahan di daerah sangat ditentukan oleh kerja sama dan dukungan dari masyarakat yang diwakili DPRD. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Banjarnegara menurut keterwakilan Partai tahun 2020 yang ada saat ini terdiri dari 50 anggota sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 1.1**  
**Komposisi Keanggotaan Partai Politik di DPRD Kabupaten Banjarnegara**  
**Hasil Pemilu 2019**



SumberData : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

## C. LINGKUNGAN STRATEGIS

### 1. KEADAAN GEOGRAFI

#### a) Letak Geografis.

Secara Astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak. diantara 7 12' - 7 31' Lintang Selatan dan 109° 20' – 109° 45' Bujur Timur.

#### b) Batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

#### c) Luas Wilayah :

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara: 106.970,997 Ha atau sebesar 3,29% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 20 Kecamatan (12 Kelurahan dan 266 Desa). Dari 20 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Punggelan merupakan wilayah kecamatan terluas dengan luas wilayah 10.284,01 Ha atau sebesar 9,614% dari luas Kabupaten Banjarnegara dan terdiri dari 17 desa.

### 2. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

#### a) Klimatologi

Ditinjau dari iklim yang ada, Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya

lebih banyak daripada bulan kering. Rata-rata curah hujan di wilayah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2020 lebih rendah yaitu 5,29 mm<sup>3</sup> dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu 5,58 mm<sup>3</sup>.

#### **b) Sumber Daya Air**

Dari segi hidrologi, berbagai mata air yang ada di Kabupaten Banjarnegara merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri maupun kebutuhan lain seperti wisata arung jeram. Sumber air tersebut antara lain berupa sungai-sungai besar, air tanah yang terdapat di sekitar Gunung Brama, Gunung Kubang, Gunung Prahu, Gunung Raja, Gunung Raga Jembangan, Gunung Petarangan dan di lembah sungai Serayu dan beberapa telaga seperti Telaga Balaikambang, Telaga Sewiwi dan Telaga Merdada.

Disamping sungai, air tanah dan telaga, Banjarnegara juga memiliki waduk buatan PLTA Panglima Besar Sudirman yang dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah dan sebagai obyek pariwisata.

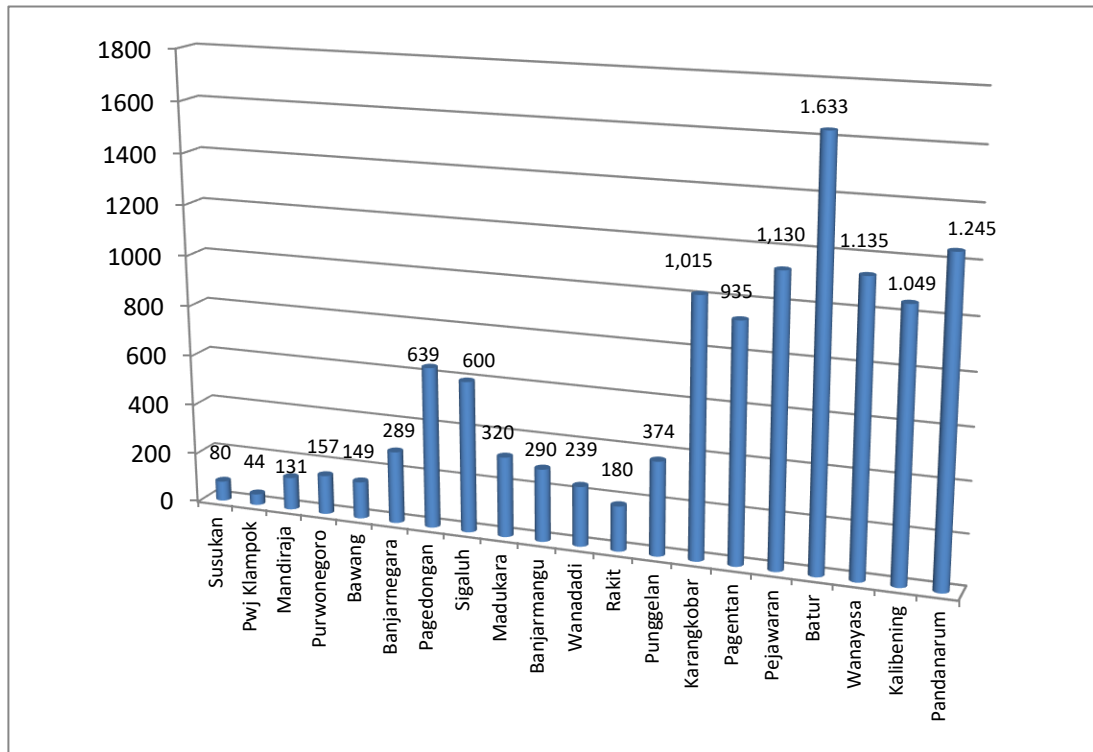
#### **c) Panjang Saluran Irigasi**

Untuk mendukung potensi pertanian dimana lahan persawahan adalah menjadi salah satu medianya, aliran sungai besar di Kabupaten Banjarnegara dimanfaatkan sebagai saluran irigasi baik irigasi primer maupun sekunder. Keseluruhan panjang saluran irigasi primer di Kabupaten Banjarnegara adalah 379.450 M dan saluran irigasi sekunder sepanjang 30.316 M. Jenis saluran primer terpanjang terletak di Kecamatan Mandiraja sepanjang 46.641 m atau 9,70% dari panjang saluran irigasi primer. Jenis saluran sekunder terpanjang di Kecamatan Madukara sepanjang 23.996 m atau 37,74% dari panjang keseluruhan irigasi sekunder, sedangkan jenis saluran tersier pada tahun 2020 tidak ada karena meningkat menjadi primer dan sekunder.

### **3. TOPOGRAFI**

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Topografi wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beranekaragam yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan pegunungan yang landai hingga curam. Ditinjau dari segi ketinggian di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Purwareja Klampok merupakan wilayah terendah yaitu 44 mdpl dan yang tertinggi adalah wilayah Kecamatan Batur yaitu 1.633 mdpl. Ketinggian wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dapat dibedakan sebagaimana tersebut dalam grafik berikut :

**Grafik I.2**  
**Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara**  
**( di atas permukaan laut/mdpl )**



Sumber Data : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2019

#### 4. ZONASI WILAYAH

Atas dasar topografi, jenis tanah, ketinggian wilayah dan keadaan hidrologi/ sumber air, wilayah Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi tiga zona wilayah sebagai berikut:

- Zona Utara: disebut Pegunungan Kendeng Utara yang berketinggian antara 600-2.500mdpl, berbukit, curam, banyak air dan subur meliputi: Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangkoobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu. Komoditi: sayur mayur, jamur, teh, sapi potong, domba dan pariwisata.
- Zona Tengah: disebut Pegunungan Serayu Utara merupakan daerah landai yang membujur dari barat ke timur sepanjang Sungai Serayu yang mempunyai ketinggian 40-300 mdpl. Daerah ini relatif datar, banyak air/irigasi dan subur. Meliputi : sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu. Komoditi: padi, palawija, ikan air tawar, kayu, pariwisata, salak, obyek wisata dan PLTA Mrica.
- Zona Selatan: disebut Pegunungan Serayu Selatan merupakan pegunungan kapur, berbukit, bergelombang, curam, sedikit air dan gersang. Daerah pegunungan ini

mempunyai ketinggian 300-600 mdpl, meliputi: Kecamatan Sigaluh, sebagian besar dari Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja dan sebagian Kecamatan Susukan. Komoditi: Bahan Tambang Galian C, ketela pohon, bambu, kelapa.

## 5. INFRASTRUKTUR DASAR

Infrastruktur dasar seperti gedung, jalan, jembatan memegang peran penting dalam merangsang dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara dalam kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat, sebagaimana tampak pada Tabel 1.3 dibawah ini.

**Tabel I.1**  
**Panjang Jalan di Kabupaten Banjarnegara**  
**2016-2020 ( km )**

Kondisi Jalan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Baik	713,685	713,685	713,685	713,685	752,997
Sedang	104,328	104,328	104,328	104,328	75,997
Rusak Ringan	41,575	41,575	41,575	41,575	62,850
Rusak Berat	79,105	79,105	79,105	79,105	47,286
<b>Jumlah</b>	<b>938.693</b>	<b>938.693</b>	<b>938.693</b>	<b>938.693</b>	<b>938,633</b>

Sumber Data: DPUPR Kabupaten Banjarnegara

## D. KONDISI EKONOMI

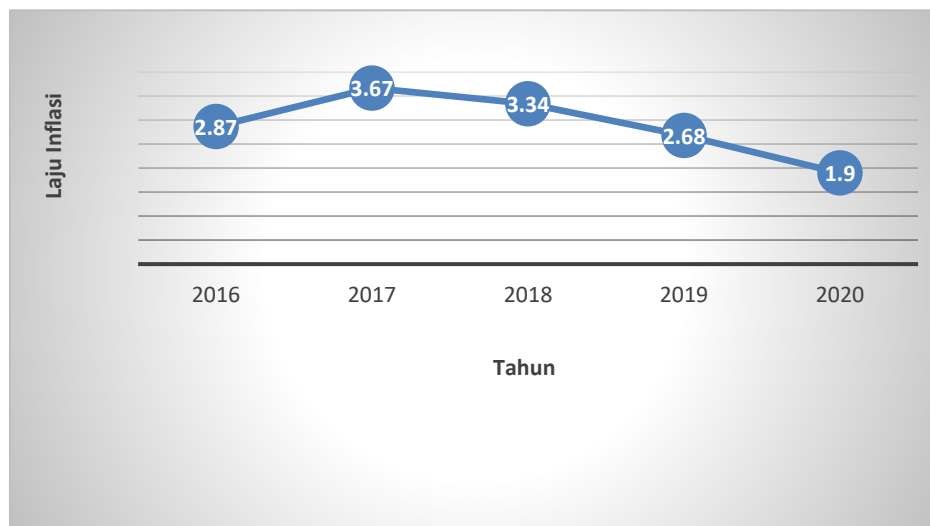
### 1. PENDAPATAN REGIONAL DOMESTIK BRUTO

Kondisi perekonomian daerah secara umum diwujudkan dalam bentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan keberhasilan perekonomian di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 21.694.338,97 sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 15.45.884,99. Pada Tahun 2019 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 21.599.477,27 dan PDRB Atas Dasar harga Konstan sebesar Rp. 15.246.865,65.

### 2. LAJU INFLASI

Perubahan harga di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap angka inflasi yang merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian. Laju inflasi dipengaruhi oleh naik turunnya produksi barang dan jasa, distribusi serta peredaran uang di suatu daerah. Adapun laju inflasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

**Grafik I.3**  
**Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 -2020 (%)**



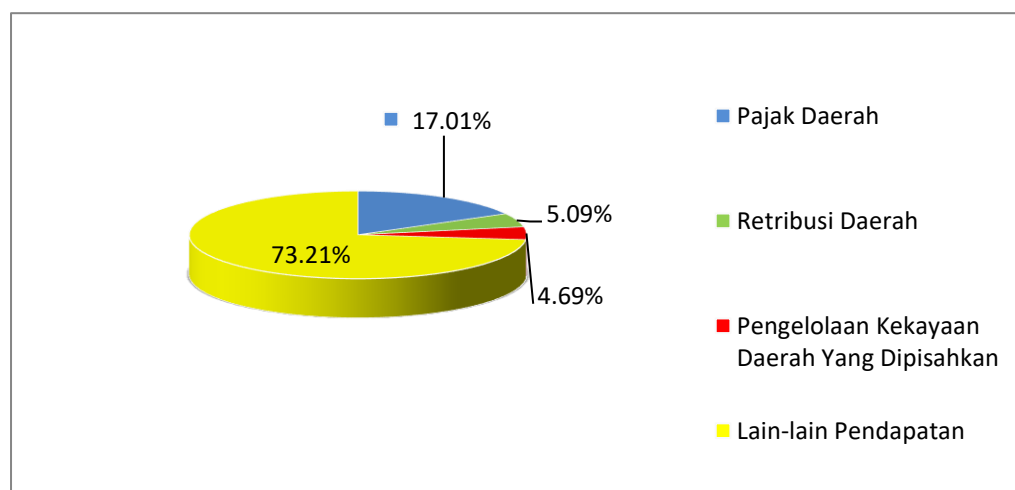
Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

### 3. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan cermin dari kemandirian fiskal daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Seiring dengan dilimpahkannya kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan (PBB PP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya maksimal untuk terus dapat meningkatkan derajat fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada.

Adapun komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Grafik I.4**  
**Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020**



Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Banjarnegara



## E. POTENSI WILAYAH

### 1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

#### a) Pertanian

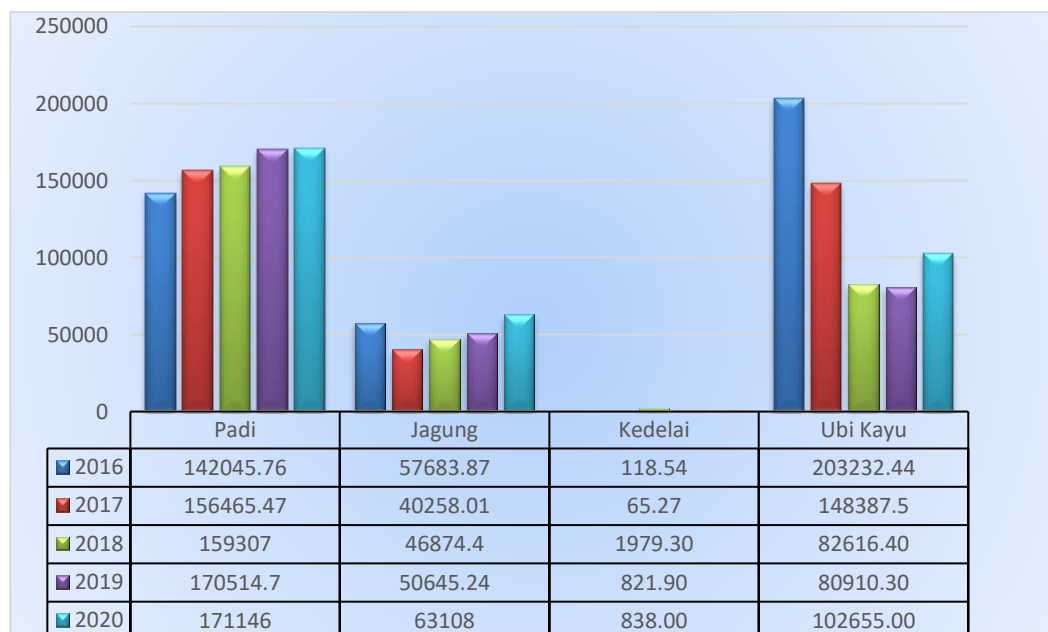
Sebagian besar potensi pertanian di Kabupaten Banjarnegara adalah pertanian bukan sawah. Kabupaten Banjarnegara dari luas lahan 106.972 Ha yang dimanfaatkan untuk pertanian bukan sawah adalah seluas 73.765 Ha atau 68,96%, untuk pertanian sawah seluas 14.128 Ha atau 13,21% sedangkan 19.079 Ha atau 17,84% merupakan lahan bukan pertanian.

Budi daya pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Banjarnegara dibedakan menjadi dua, yaitu komoditas tanaman pangan dan komoditas tanaman hortikultura yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran.

Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan meliputi padi, jagung dan kedelai. Sedangkan untuk hortikultura jenis buah-buahan yang dikembangkan adalah durian, salak dan pisang. Untuk hortikultura sayuran hanya kentang yang menjadi unggulan.

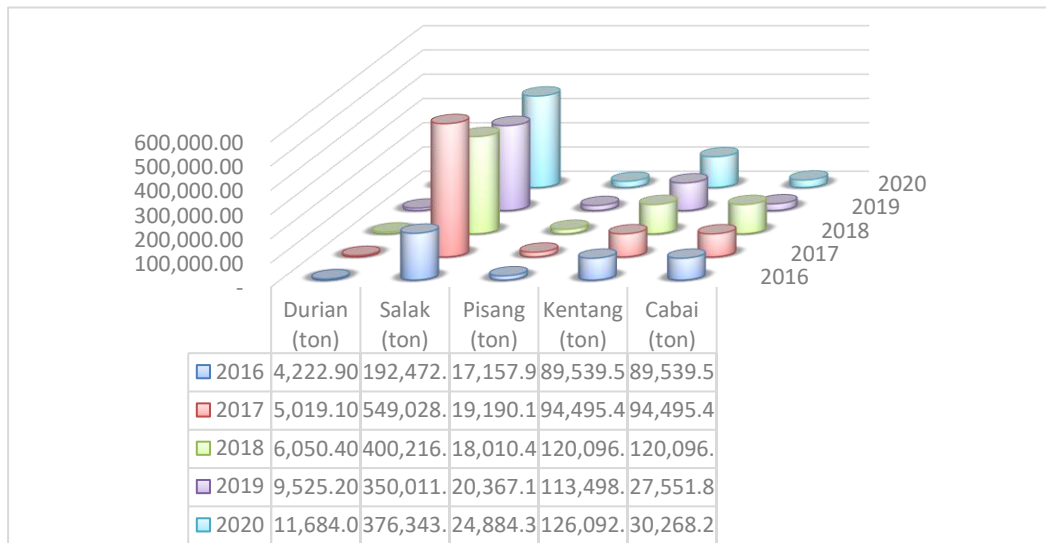
Adapun produksi padi dan hortikultura selama beberapa tahun adalah sebagai berikut:

**Grafik I.5**  
**Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2016-2020 (Ton)**



Sumber Data : Distankan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

**Grafik I.6**  
**Produksi Hortikultura Kabupaten Banjarnegara**  
**Pada Tahun 2016-2020 (ton)**



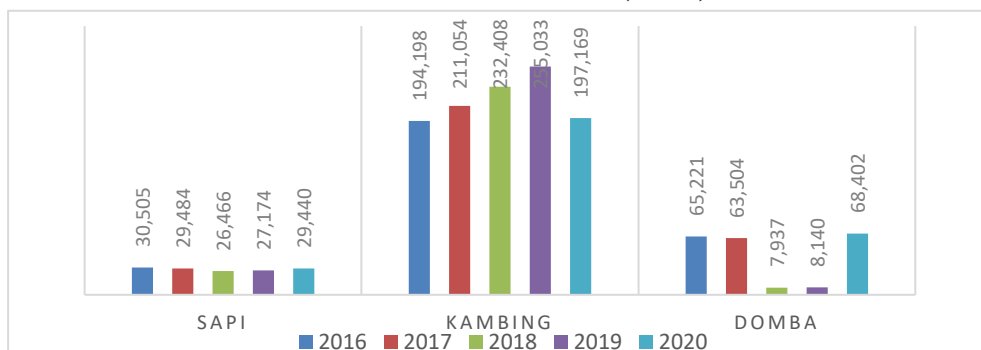
\Sumber Data :Distankan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

**b) Peternakan**

Ternak yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 3 kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk dalam kategori ternak besar antara lain sapi, kerbau dan kuda, sedangkan ternak yang masuk kedalam kategori ternak kecil antara lain kambing, domba, babi dan kelinci sementara yang masuk dalam kategori unggas adalah kelompok ayam dan itik. Namun peternakan yang penting dan prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara adalah ternak kambing, domba dan sapi. Adapun kusus untuk populasi domba, Kabupaten Banjarnegara memiliki komoditas unggulan yaitu domba batur yang mempunyai keunggulan dibanding domba-domba yang lain. Domba Batur hanya dibudidayakan didaerah pegunungan dengan kondisi udara yang dingin.

Adapun populasi ternak apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Grafik I.7**  
**Populasi Ternak Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2016 -2020 (Ekor)**

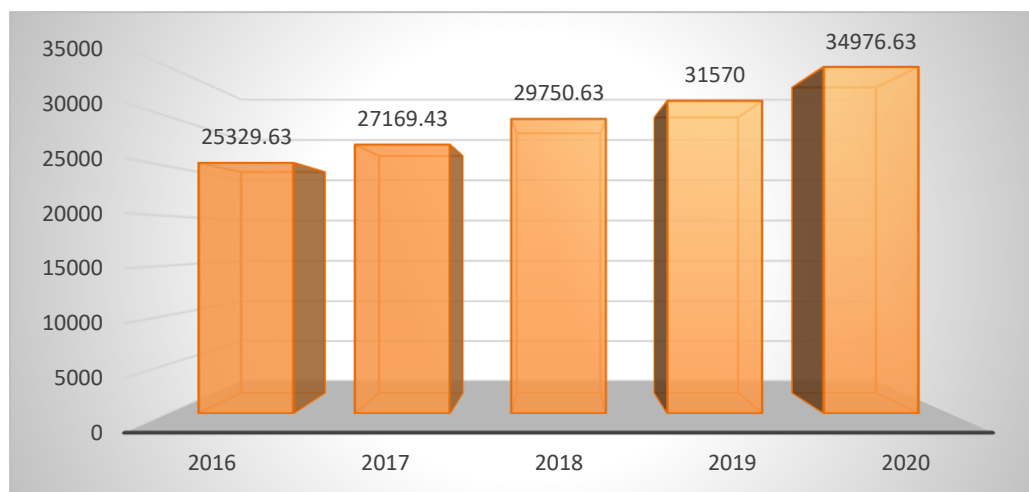


Sumber Data : Distankan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

### c) Perikanan

Budi daya ikan air tawar yang dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi kolam pembenihan, kolam pembesaran, mina padi, jaring apung dan perikanan sawah. Adapun jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan gurameh dan ikan nila serta ikan lele. Selain budidaya ikan, yang menjadi unggulan di Kabupaten Banjarnegara adalah produksi Benih Ikan dengan unggulannya adalah ikan nila, ikan patin dan ikan lele. Benih ikan dari Banjarnegara menjadi pemasok utama untuk mencukupi benih ikan di Jawa Tengah.

**Grafik 1.8**  
**Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2016 – 2020 (Ton)**

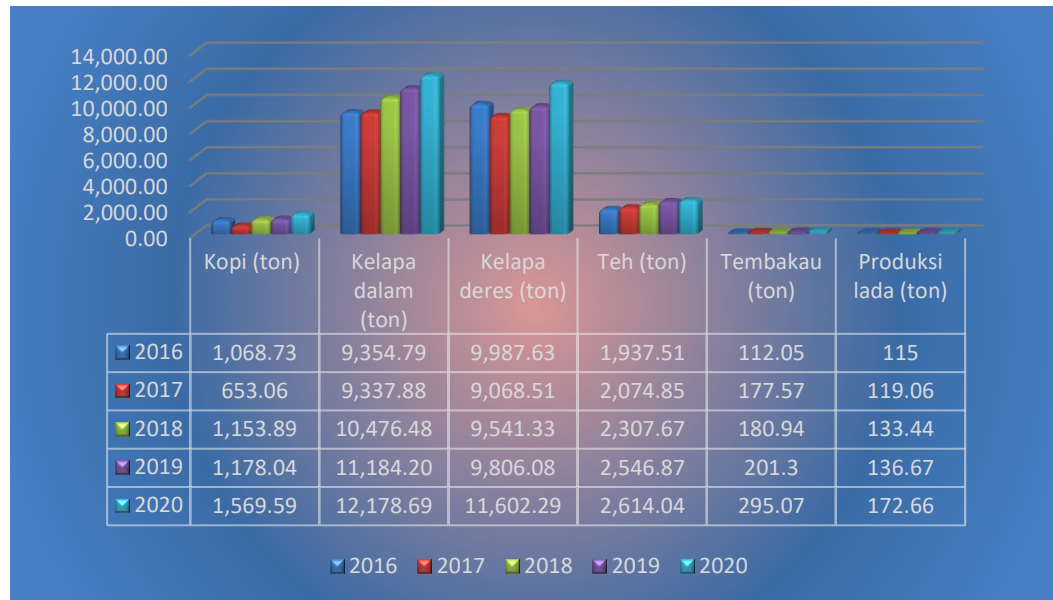


Sumber Data :Distankan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

### d) Perkebunan

Tanaman perkebunan yang menjadi unggulan dan dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi kopi, kelapa dalam, kelapa deres, teh, tembakau dan lada. Selain itu di Kabupaten Banjarnegara juga dikembangkan tanaman obat-obatan seperti lada, jahe, kunyit, pohon dilem/nilam dan beberapa jenis tanaman obat lain yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi.

**Grafik 1.9**  
**Produksi Perkebunan Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2016 – 2020**



Sumber Data :Distankan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

## 2. POTENSI SUMBER DAYA ENERGI

Potensi sumber daya energi yang ada di Kabupaten Banjarnegara meliputi Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Panglima Besar Sudirman dengan kemampuan daya 180 Mega Watt (MW). Disamping itu juga terdapat PLTA Tulis di Kecamatan Madukara dengan kemampuan daya 12 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Geotermal (PLTG) Dieng di Kecamatan Batur dengan kemampuan daya 60 MW.

## 3. POTENSI INDUSTRI

Sektor industri merupakan sektor penting selain sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara. Sektor Industri dibedakan menjadi industri besar dengan nilai investasi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sejumlah 6 perusahaan. Industri menengah nilai investasi Rp500.000.000,00 – Rp10.000.000.000,00 sejumlah 53 perusahaan. Industri kecil/mikro dengan dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejumlah 1998 industri.

## 4. POTENSI PARIWISATA

Potensi wisata yang banyak dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara adalah wisata alam. Adapun obyek wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara antara lain:

- Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Wisata Rekreasi Khusus Arung Jeram Sungai Serayu.
- Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas.

- Pusat Seni dan Kerajinan Keramik Klampok.
- Wisata Tirta Waduk Pangsar Sudirman.
- Taman Rekreasi Anglir Mendung Paweden.
- Wisata Alam Curug Pitu
- Wisata Alam Curug Sikopel.
- Wisata Alam Air Panas dan Curug Biting.
- Wisata Alam Tampomas.
- Wisata Air Panas Kali Putih.
- Curug Pletuk dikelola oleh Perhutani.
- Serayu Park.
- Surya Yudha Sport Center

## F. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. KEPENDUDUKAN

Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,71% bila dibandingkan dengan Tahun 2019, yaitu dari 1.022.503 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 1.029.728 jiwa pada Tahun 2020 atau bertambah sejumlah 7.225 jiwa. Dari 1.029.728 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 524.380 jiwa atau 50,92 %, dan berjenis kelamin perempuan 505.348 jiwa atau sebesar 49,08 %. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan trend jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020**

NO	Jenis Kelamin	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Laki –laki	510.395	512.082	516.192	521.256	524.380
2.	Perempuan	491.461	491.902	494,853	501.247	505.348
	<b>JUMLAH</b>	1.001.856	1.003.984	1,011,045	1.022.503	1.029.728

*Sumber Data : Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara*

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak 88.103 jiwa atau 8,56 % dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara atau meningkat 0,05% dari Tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah penduduk 23.140 jiwa atau 2,25 % dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara.

Untuk tingkat kepadatan penduduk Tahun 2020 adalah sebesar 962,63 jiwa per Km<sup>2</sup>, dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Punggelan yaitu sebesar 2.715

jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Pandanarum 276 jiwa per Km<sup>2</sup>.

## 2. KETENAGAKERJAAN

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,53% berimplikasi pada penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan. Adapun banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut jenis kelamin dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

**Tabel I.3**  
**Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Pencari kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tahun 2016	3.643	3.864	7.507
Tahun 2017	3.600	3.773	7.376
Tahun 2018	2.750	3.368	6.118
Tahun 2019	3.253	3.733	6.986
Tahun 2020	2.503	3.171	5.674

Sumber Data : Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara

Sedangkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan kerja pada Tahun 2016 sampai 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.4**  
**Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Bekerja Tahun 2016 -2020**

No	Penempatan Tenaga Kerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	AKL	3.482	1.875	986	1.002	682
2.	AKAD	509	657	699	598	71
3.	AKAN	673	686	867	780	249
4.	INFORMAL	-	-	4.445	7.949	12.706
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.664</b>	<b>3.218</b>	<b>6.980</b>	<b>10.329</b>	<b>13.708</b>

SumberData : Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara

## 3. MATA PENCAHARIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat 89 jenis mata pencaharian penduduk Kabupaten Banjarnegara. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjarnegara yang bekerja masih didominasi oleh petani/pekebun mencapai 226.454 orang atau 21,11 %, diikuti oleh penduduk belum/tidak bekerja

sebesar 220.674 atau 21,43%, bekerja mengurus rumah tangga sebesar 175.114 orang atau 17,01%, Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 145.734 orang atau 14,15%, bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 62.884 orang atau 6,3% dan bekerja sebagai buruh harian lepas sebanyak 43.788 orang atau 4,25%.

#### 4. PENDIDIKAN PENDUDUK

Jika dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Banjarnegara berpendidikan SD/MI/Sederajat. Adapun jumlah penduduk berpendidikan SD/MI/Sederajat yaitu sejumlah 378.642 orang atau 36,77%, tidak/belum sekolah sejumlah 207.599 orang atau 20,16%, SLTP/MTs/Sederajat sejumlah 158.844 orang atau 15,43%, belum tamat SD sejumlah 132.783 orang atau 12,89%, SMA/Sederajat sejumlah 118.346 orang atau 11,49%. Sedangkan jumlah penduduk berpendidikan Diploma IV/S1 sejumlah 21.900 orang atau 2,13%, Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda sejumlah 6.339 orang atau 0,62%, Diploma I/II sejumlah 4.346 orang atau 0,42%, Strata II sejumlah 881 orang atau 0,086%, dan Strata III sejumlah 48 orang atau 0,04%.

#### 5. KESEHATAN

Penanganan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara saat ini mengutamakan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya kesehatan. Sarana Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara meliputi pelayanan kesehatan dasar berupa Puskesmas Perawatan (15 unit) yang terdiri dari puskesmas perawatan PONED (13 Unit) dan Puskesmas Perawatan Non PONED (2 unit), Puskesmas Non Perawatan (20 unit), Puskesmas Pembantu (39 unit), Puskesmas Keliling (35 unit), serta untuk pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Umum (3 unit), Rumah Sakit Khusus (0 unit), laboratorium pemerintah (1 unit), Apotek (66 unit) dan posyandu (1.574). Adapun tenaga medis, keperawatan dan kebidanan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang tersebar di Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana Pelayanan Kesehatan dan Klinik sebanyak 3.948 orang yang terdiri dari dokter spesialis sejumlah 59 orang, dokter umum sejumlah 125 orang, dokter gigi sejumlah 29 orang, tenaga keperawatan sebanyak 861 orang dan tenaga kebidanan sebanyak 683 orang, psikolog klinis 2 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 114 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 69 orang tenaga gizi sebanyak 79 orang, tenaga keterampilan fisik 13 orang, tenaga biomedik sebanyak 112 orang, tenaga keteknisan medis sebanyak 65 orang tenaga kesehatan lainnya dan asisten tenaga Kesehatan sebanyak 37 orang.

## 6. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat tercermin dari jumlah Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan terhadap PMKS. Berdasarkan data Tahun 2020 jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah 90.809 jiwa atau naik sebesar 6,14% bila dibandingkan dengan jumlah PMKS pada Tahun 2019.

## 7. KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH

Sukses tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satu faktor keberhasilan pelayanan tersebut adalah tersedianya aparatur atau Pegawai Pemerintah Daerah Otonom. Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang, maka selengkapnya kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. I.5**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banjarnegara**  
**Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang**  
**( Keadaan Tahun 2016-2020 )**

NO	PANGKAT	GOL.	JML PEG. 31-12-2016	JML PEG. 31-12-2017	JML PEG. 31-12-2018	JML PEG. 31-12-2019	JML PEG. 31-12-2020
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	4	4	2	3	3
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	21	19	17	14	11
4.	Pembina Tk. I	IV/b	130	147	175	258	234
5.	Pembina	IV/a	3.080	2.892	2.627	2.326	2.065
6.	Penata Tk. I	III/d	791	850	765	799	760
7.	Penata	III/c	746	758	733	870	857
8.	Penata Muda Tk. I	III/b	1.090	1.164	1.115	1.434	1.398
9.	Penata Muda	III/a	1.078	977	982	812	808
10.	Pengatur Tk.I	II/d	362	270	297	359	336
11.	Pengatur	II/c	514	765	786	690	670
12.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	416	391	310	306	296
13.	Pengatur Muda	II/a	317	220	177	90	83
14.	Juru Tk. I	I/d	53	59	59	114	109
15.	Juru	I/c	165	155	140	79	78
16.	Juru Muda Tk. I	I/b	29	18	7	7	7
17.	Juru Muda	I/a	6	6	3	1	1
	<b>J U M L A H</b>		<b>8.802</b>	<b>8.695</b>	<b>8.195</b>	<b>8.162</b>	<b>7.716</b>

Sumber Data : BKD Kabupaten Banjarnegara



Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.6**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2020**  
**(keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020)**

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		%	%	Jumlah	%	%	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Strata 3 ( S-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
2	Strata 2 ( S-2)	244	2,77	234	2,69	244	2,77	234	2,69	218	2,83
3	Strata 1 ( S-1 )	5.281	60,00	5.174	59,51	5.281	60,00	5.174	59,51	4.819	62,45
4	D 4	58	0,66	89	1,02	58	0,66	89	1,02	100	1,30
5.	D. III /Sarmud	762	8,66	951	10,94	762	8,66	951	10,94	930	12,05
6.	D. I / II	517	5,87	454	5,22	517	5,87	454	5,22	286	3,71
7.	SLTA	1.525	17,33	1.419	16,32	1.525	17,33	1.419	16,32	1.083	14,04
8.	SLTP	300	3,40	273	3,14	300	3,40	273	3,14	213	2,76
9.	SD	115	1,31	101	1,16	115	1,31	101	1,16	66	0,86
	<b>Jumlah</b>	<b>8.802</b>	<b>100</b>	<b>8.695</b>	<b>100</b>	<b>8.802</b>	<b>100</b>	<b>8.695</b>	<b>100</b>	<b>7.716</b>	<b>100</b>

Sumber Data : BKD Kabupaten Banjarnegara

## G. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 1. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1) Pendidikan

- a. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM),

khususnya pada jenjang SMP/MTs/Paket B yang capaian APM-nya baru mencapai 74,57% .

- b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian angka rata-rata UN SD/MI yang sebesar 6,42 (2019), angka rata-rata UN SMP/MTs yang sebesar 5,13 (2019). Pada tahun 2020 Ujian Nasional SD dan SMP tidak diselenggarakan.
- c. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini antara lain terlihat dari rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk untuk SD/MI dengan rasio 92,03 %, SMP/MTS dengan rasio 31,9 %.

## 2) Kesehatan

- a. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. Hal ini antara lain terlihat dari capaian Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 123,9 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 11,67 per 1000 kelahiran hidup dan masih ditemukannya balita gizi buruk capaian 0,06%, sehingga perlu optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan ibu dan anak.
- b. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban ganda penyakit dan penyakit degeneratif. Hal ini terlihat dari kasus *Acute Flacid Paralysis* (AFP) sebanyak 3 kasus, penemuan pasien baru TB 60,71% atau sebanyak 1.170 kasus, dan jumlah penderita malaria baru (API) 0,03%. HIV AIDS sebanyak 97 Kasus, Peningkatan kasus Hipertensi dan Diabetes Militus. Serta kasus penularan Virus *Covid-19* tahun 2020 tercatat 2013 kasus dengan angka kematian sejumlah 128 kasus.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal dan belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar 72,7, cakupan perilaku hidup bersih dan sehat strata utama dan paripurna 81,52%.

## 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya kualitas jalan dan jembatan. Hal ini terlihat dari capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang hanya sebesar 80,171% pada tahun 2020.
- b. Masih rendahnya sistem drainase akibat saluran drainase tersumbat, dan belum semua ruas jalan memiliki saluran drainase/gorong-gorong. Hal ini terlihat dari panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) hanya sebesar 3,194%.
- c. Masih rendahnya persentase capaian rumah bersanitasi yang hanya sebesar 64,07%.

#### 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Belum optimalnya kualitas perumahan. Hal ini terlihat dari rasio rumah layak huni yang baru sebesar 86,4%, rumah tangga pengguna air bersih yang baru mencapai 94,52%.

#### 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- a. Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, disebabkan keterbatasan jumlah personil, sarana prasarana dan anggaran untuk operasional patroli.
- b. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.

#### 6) Sosial

- a. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sementara cakupan penanganannya sangat terbatas. Hal ini terlihat dari persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 57,59%.
- b. Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan PMKS. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh capaian peran serta lembaga masyarakat yang aktif baru 15,22 % dan yang perorangan sebesar 8,81 %.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS meliputi penanganan penyandang disabilitas, penanganan eks psikotik, penanganan korban tindak kekerasan serta penanganan korban bencana (penyediaan logistik dan psikososial).

## 2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### 1) Tenaga kerja

- a. Masih adanya pengangguran dan rendahnya kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka 5,86 % dan tingkat partisipasi angkatan kerja 69,85%.
- b. Belum semua perusahaan menerapkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan 69,91%.

### 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Belum melembaganya Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Hal ini ditandai dengan persentase OPD yang melakukan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender baru 87,5 % OPD.



- b. Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak, ditandai dengan masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga eksekutif (2,13%) dan legislatif (24%).
  - c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, penelantaran, eksploitasi terhadap perempuan dan anak, namun belum disertai sistem perlindungan dan pelayanan terpadu yang memadai. Hal ini ditandai oleh rasio KDRT 0,043% dan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu yang baru sebesar 100%.
  - d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak pada 6 klaster layak anak. Hal ini ditandai oleh pencapaian Kabupaten Layak Anak yang baru pada peringkat inisiasi.
  - e. Lemahnya sistem data informasi gender dan anak dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender. Hal ini nampak pada angka indeks pemberdayaan gender yang baru mencapai 79,12 %.
- 3) Pangan
- a. Adanya potensi kerawanan pangan di Banjarnegara yang dipengaruhi oleh produksi pangan yang rendah, kemiskinan, kurang lancarnya distribusi pangan, dan seringnya terjadi bencana alam.
  - b. Masih kurangnya cadangan pangan daerah, yang ditandai oleh capaian penguatan cadangan pangan yang baru mencapai 26,16 %. Sesuai SPM, standar cadangan daerah seharusnya sebanyak 100 ton.
  - c. Stabilitas harga pangan pokok belum optimal dimana capaian baru mencapai 5-10%.
  - d. Kualitas konsumsi pangan belum optimal, dengan tingkat ketergantungan konsumsi terhadap beras yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang baru tercapai 91,5%.
  - e. Belum optimalnya kontrol terhadap pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya pada produk pangan segar dan bahan tambahan pangan pada produk pangan olahan.
  - f. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pangan.
  - g. Potensi pangan lokal belum ditangani secara optimal.
- 4) Lingkungan hidup
- a. Menurunnya kualitas air permukaan (air danau/waduk/embung) dan menurunnya potensi sumber daya air bersih untuk berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari maupun untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Hal ini didukung oleh indeks kualitas air baru mencapai 58,75.

- b. Belum optimalnya penanganan limbah sehingga dapat memberikan dampak pada penurunan kualitas air dan udara. Hal ini ditunjukkan oleh indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai yang baru mencapai 64,24%.
  - c. Masih rendahnya penanganan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah persampahan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penanganan sampah yang baru mencapai 51,04%.
  - d. Semakin luasnya kerusakan lahan, khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng dan terjadinya gerakan tanah yang berpotensi longsor.
  - e. Belum optimalnya antisipasi dampak atas pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan.
- 5) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- a. Belum optimalnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kepemilikan KTP 99,47%, kepemilikan akte kelahiran 0 – 18 tahun sebesar 92 % %.
  - b. Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan.
- 6) Pemberdayaan masyarakat desa
- a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang hanya sebesar 27,81%.
  - b. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa/kelurahan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh persentase perkembangan bumdes sebesar 82,20 % .
  - c. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, keuangan, profil, penataan batas dan tata ruang desa.
- 7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi Jangka Panjang pada ibu, dimana dapat bekerja lebih efektif dalam menekan angka kehamilan.
  - b. Masih tingginya Pasangan Usia Subur ber-KB tapi tidak terpenuhi (*Unmeet need*) sebesar 6,91%.
  - c. Masih rendahnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja, dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan melalui kelompok Bina



Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga melalui kelompok kegiatan UPPKS dalam peningkatan pendapatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan dalam upaya mewujudkan pengendalian penduduk hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka *Total Fertility Rate* sebesar 2,108.

#### 8) Perhubungan

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh jumlah terminal bus yang hanya berjumlah 6 unit dan kurangnya sarana prasarana keselamatan jalan terutama rambu, marka, penerangan jalan umum dan guardrail yang sampai saat ini baru terpenuhi 64,24 %.
- b. Belum semua daerah mempunyai jaringan trayek, dengan rasio izin trayek yang tersedia baru mencapai 46,46%.
- c. Kurangnya kapasitas SDM dalam manajemen keselamatan lalu lintas dan belum tersusunnya perencanaan rekayasa lalu lintas.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan menjaga fasilitas dan perlengkapan LLAJ.

#### 9) Komunikasi dan informatika

Belum terintegrasinya jaringan dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

#### 10) Koperasi, usaha kecil, dan menengah

- a. Masih rendahnya kualitas koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat. Koperasi aktif tercatat sebesar 30,07%.
- b. Daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh keterampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.
- c. Masih rendahnya sumberdaya manusia pengelola koperasi, khususnya yang berbasis masyarakat.

#### 11) Penanaman modal

Nilai persetujuan investasi dan nilai realisasi investasi belum optimal disebabkan oleh fasilitasi investasi yang belum optimal, sarana prasarana pendukung investasi yang belum memadai, dan belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi. Pada tahun 2020 nilai investasi sebesar Rp. 270.307.861.092,-

#### 12) Kepemudaan dan olahraga



- a. Belum optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.
  - b. Belum optimalnya prestasi olahraga, pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi dan sarana prasarana olahraga yang masih kurang.
  - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga rekreasi.
- 13) Statistik
- Kurang optimalnya ketersediaan data guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah.
- 14) Persandian
- Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.
- 15) Kebudayaan
- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian daerah karena pengaruh budaya luar.
  - b. Belum optimalnya pelestarian adat dan tradisi masyarakat.
  - c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah penting daerah.
  - d. Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya 51,43%.
  - e. Belum optimalnya pengelolaan museum sebagai daya tarik wisata.
- 16) Perpustakaan
- a. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah. Pada Tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan baru 11.233 pengunjung
  - b. Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan lembaga lain.
  - c. Belum ditemukannya naskah kuno dan etnis nusantara yang dibukukan.
  - d. Belum adanya penguatan literasi.
- 17) Kearsipan
- a. Masih kurangnya kompetensi SDM pengelola kearsipan dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan arsip/dokumen.
  - b. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara baik. Hal ini ditandai oleh pengelolaan arsip secara baku yang baru mencapai 8,33%.
  - c. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk menyerahkan arsip dinamis inaktif untuk dikelola oleh unit pengolah arsip daerah.
  - d. Belum terbangunnya jaringan informasi kearsipan serta pengelolaan arsip berbasis IT.

### 3. Urusan Pilihan

#### 1) Kelautan dan perikanan

- a. Pendapatan pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan nelayan masih belum optimal.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya walaupun potensi lahan untuk budidaya tersedia. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 tercatat sebesar 34.976,63 ton.
- c. Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya air untuk budidaya perikanan dengan sektor yang lain.
- d. Kurangnya kuantitas dan kompetensi petugas teknis perikanan. Cakupan bina kelompok pembudi daya ikan baru sebesar 21,1%.
- e. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dipengaruhi penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

#### 2) Pariwisata

- a. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha dan jasa pariwisata.
- b. Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran ekonomi kreatif.
- c. Rendahnya kontribusi PAD dari sektor pariwisata dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 3,70%.

#### 3) Pertanian

- a. Pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan. Hal ini diindikasikan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di angka 105,63%.
- b. Produksi peternakan terdapat penurunan polpulasi ternak. Populasi ternak kambing pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,69 % dibandingkan jumlah populasi kambing pada tahun 2019.
- c. Berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian.

#### 4) Perdagangan

- a. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan, terlihat dari kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB hanya sebesar 10,07%(2019).
- b. Cakupan fasilitasi pengembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) sangat rendah, terlihat dari persentase UDKM yang terfasilitasi kegiatan promosi/pameran.
- c. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata. Hal ini terlihat dari cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang baru 400 orang.





- d. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih.
  - e. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masih kurang terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.
- 5) Perindustrian
- a. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah disebabkan oleh keterampilan SDM, penggunaan teknologi, dan akses permodalan yang masih rendah. Jumlah industri kecil menengah dan besar yang tercatat sebesar 22.805 unit yang terdiri dari industri kecil sejumlah 22.762 unit dan industri menengah sejumlah 35 unit dan besar 8 unit.
  - b. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk.
  - c. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha.
  - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk UKM / IKM.

#### **4. Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### 1) Administrasi pemerintahan

- a. Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru.
- b. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP)
- c. Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah. Laporan kinerja yang disajikan Perangkat Daerah belum menggambarkan kinerja Perangkat Daerah, tetapi masih sebatas menceritakan proses ataupun aktifitas yang dilaksanakan.

##### 2) Pengawasan

- a. Kurangnya cakupan pemeriksaan disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM pemeriksa.
- b. Masih kurangnya kompetensi SDM pemeriksa sesuai dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- c. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- d. Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin.

##### 3) Perencanaan

- a. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan belum optimal.
- b. Adanya amanat pemerintah kepada daerah terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan multi sektor perlu ditindaklanjuti.

- c. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- 4) Keuangan
    - a. Belum optimalnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 11,96%.
    - b. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja setiap tahunnya.
    - c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, terutama aset tanah yang belum bersertifikat.
  - 5) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
    - a. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih kurang.
    - b. Penempatan PNS yang kurang proporsional sesuai kebutuhan.
    - c. Masih banyaknya kasus indisipliner pegawai.

## 2. ISU STRATEGIS

Rumusan isu strategis yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

### 1. Kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang kurang merata

Hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 15,46% dan gini rasio (ketimpangan pendapatan) merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan Indeks Gini sebesar 0,34 (kategori sedang) pada tahun 2015. Pengukuran Indeks Gini Rasio dilakukan setiap 5 tahun sekali.

### 2. Perkembangan sektor perekonomian utama relatif lambat

Nilai investasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 356.611.427.557,-, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 13,57 % (2019) produksi pertanian cenderung menurun, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 27.655 unit.

### 3. Kualitas pendidikan dan derajat kesehatan belum optimal

Kondisi kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka rata-rata UN SD/MI sebesar 6,42, angka rata-rata UN SMP/MTs yang sebesar 5,13, SD/MI ruang kelas kondisi baik 89,30%, dan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik 87,04%, guru SD memenuhi kualifikasi S1/D-IV 96,07 %, guru SMP memenuhi kualifikasi S1/D-IV 99,38%,. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator jumlah kasus AKI sebesar 123,9 per 100.000 KH, AKB sebesar 11,67 per 1000 KH, persentase balita gizi buruk (BB/TB) sebesar 0,06%, dan kasus stunting sebesar 23 %.

#### **4. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai**

Walaupun persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 80,22%, namun persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) hanya sebesar 3,194%, persentase rumah tangga pengguna air bersih 94,52%. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, seperti area parkir, terminal tipe c, halte, belum semua daerah mempunyai jaringan trayek, dan belum semua jaringan jalan dan daerah rawan kecelakaan memiliki fasilitas keselamatan jalan.

#### **5. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan**

Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan terutama ditandai oleh terjadinya banjir dan gerakan tanah yang berpotensi longsor, meluasnya jumlah lahan kritis, degradasi tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lahan akibat cara budidaya yang salah. Bertambahnya jumlah industri yang menghasilkan limbah, menurunnya potensi sumberdaya air bersih, menurunnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, menurunnya kualitas air, meningkatnya jumlah timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta masih rendahnya budaya dan kepedulian terhadap lingkungan juga berkontribusi cukup signifikan terhadap penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

#### **6. Belum optimalnya pemberdayaan gender**

Hal ini ditandai dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Adapun IDG Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 sebesar 72,84.

#### **7. Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal**

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah baru sebesar 11,96% (APBD TA 2020), persentase Aset tanah Pemda yang bersertifikat 36,63% atau 453 bidang dari 1.236 bidang dan persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku sebesar 8,33% dan tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 3, dan tingkat maturitas SPIP pada level 3.

#### **8. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah**

Hal ini ditandai oleh mulai bergesernya nilai-nilai yang hidup di masyarakat, seperti mulai lunturnya budaya gotong royong, sopan santun, konsumsi minuman keras, dan sebagainya.

#### **9. Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana**

Hal ini ditandai oleh banyaknya jenis bencana alam yang rawan terjadi yaitu longsor, gas beracun, kekeringan, dan banjir. Sedangkan berdasarkan wilayah administratif,



sebanyak 85% wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.